

**OPERASI PERDAMAIAN UNAMA DALAM PERLINDUNGAN HAK  
PEREMPUAN DI AFGHANISTAN ERA TALIBAN 2021-2025**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**AZZAHRA FERICA EFENDI**

**2256071006**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BANDAR LAMPUNG**

**2026**

**OPERASI PERDAMAIAN UNAMA DALAM PERLINDUNGAN HAK  
PEREMPUAN DI AFGHANISTAN ERA TALIBAN 2021-2025**

**Oleh**

**AZZAHRA FERICA EFENDI**

**Skripsi**

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**Pada**

**Jurusan Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BANDAR LAMPUNG**

**2026**

## ABSTRAK

### OPERASI PEACEBUILDING UNAMA DALAM PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DI AFGHANISTAN ERA TALIBAN 2021–2025

Oleh

**Azzahra Ferica Efendi**

Kembalinya Taliban ke tampuk kekuasaan Afghanistan pada tahun 2021 menyebabkan kemunduran signifikan terhadap hak-hak perempuan, khususnya dalam bidang pendidikan, pekerjaan, mobilitas, dan partisipasi di ruang publik. Berbagai kebijakan yang diterapkan Taliban menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak pada semakin terbatasnya ruang hidup perempuan Afghanistan. Dalam situasi tersebut, United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) berperan sebagai misi politik Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menjalankan berbagai upaya perlindungan terhadap perempuan Afghanistan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis operasi peacebuilding yang dilakukan UNAMA dalam perlindungan hak perempuan di Afghanistan pada era Taliban tahun 2021–2025.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka berupa laporan resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa, laporan UNAMA, UN Women, jurnal ilmiah, buku, dan dokumen relevan lainnya. Penelitian ini menggunakan teori Peacebuilding Operations yang terdiri atas indikator advokasi, pemberdayaan, perlindungan hak asasi manusia, dan pendampingan sosial. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNAMA telah menjalankan operasi peacebuilding melalui empat bentuk utama, yaitu advokasi internasional terhadap pelanggaran hak perempuan, pemberdayaan perempuan melalui dukungan pendidikan dan penguatan kapasitas, perlindungan hak asasi manusia melalui pemantauan dan pelaporan pelanggaran, serta pendampingan sosial melalui koordinasi bantuan kemanusiaan dan perlindungan kelompok rentan. Penelitian ini juga menemukan bahwa pelaksanaan peacebuilding UNAMA menghadapi berbagai hambatan, antara lain kebijakan diskriminatif Taliban, keterbatasan akses operasional, minimnya partisipasi perempuan dalam proses perdamaian, serta terbatasnya mandat UNAMA yang bersifat non-koersif. Oleh karena itu, meskipun belum mampu menghentikan secara langsung kebijakan Taliban terhadap perempuan, UNAMA tetap berperan penting dalam menjaga perlindungan normatif, memperkuat pemberdayaan perempuan, dan mempertahankan perhatian internasional terhadap kondisi hak perempuan di Afghanistan.

**Kata Kunci:** UNAMA, *Peacebuilding Operations*, Hak Perempuan, Afghanistan, Taliban.

## **ABSTRACT**

### **UNAMA'S PEACEBUILDING OPERATIONS IN THE PROTECTION OF WOMEN'S RIGHTS IN AFGHANISTAN UNDER THE TALIBAN REGIME 2021–2025**

**By**

**Azzahra Ferica Efendi**

The return of the Taliban to power in Afghanistan in 2021 led to a significant deterioration of women's rights, particularly in the areas of education, employment, mobility, and participation in public life. The policies implemented by the Taliban have resulted in systematic human rights violations that further restricted the social and political space available to Afghan women. In this context, the United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) has played an important role as a United Nations political mission in promoting the protection of women's rights. This study aims to analyze UNAMA's peacebuilding operations in protecting women's rights in Afghanistan during the Taliban era from 2021 to 2025. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. The data used are secondary data collected through a literature review of official United Nations documents, UNAMA reports, UN Women reports, academic journals, books, and other relevant sources. The study applies the Peacebuilding Operations theory, which consists of four indicators: advocacy, empowerment, human rights protection, and social assistance. The findings reveal that UNAMA has implemented peacebuilding operations through four main forms of intervention, namely international advocacy on violations of women's rights, women's empowerment through educational support and capacity-building initiatives, human rights protection through monitoring and reporting mechanisms, and social assistance through the coordination of humanitarian aid and the protection of vulnerable groups. The study also finds that UNAMA's peacebuilding efforts face several obstacles, including discriminatory policies imposed by the Taliban, limited operational access, the lack of women's participation in peace processes, and the restricted non-coercive mandate of UNAMA. Therefore, although UNAMA has not been able to directly stop the Taliban's discriminatory policies against women, it continues to play a significant role in maintaining normative protection, promoting women's empowerment, and sustaining international attention toward the condition of women's rights in Afghanistan.

**Keywords:** UNAMA, Peacebuilding Operations, Women's Rights, Afghanistan, Taliban.

**Judul Skripsi** : **Operasi Perdamaian UNAMA dalam Hak Perempuan di Afghanistan Era Taliban 2021-2025**

**Nama Mahasiswa** : **Azzahra Ferica Efendi**

**Nomor Pokok Mahasiswa** : **2256071006**

**Jurusan** : **Hubungan Internasional**

**Fakultas** : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



2. **Ketua Jurusan Hubungan Internasional**

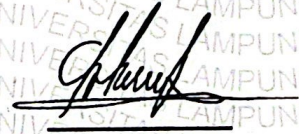
*Simon Sumajoyo H. S.A.N.*  
**Simon Sumajoyo H. S.A.N., M.PA.**  
**NIP. 1981062820050111003**

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua**

**: Gita Kharisma, S.IP., M.Si**



**Penguji Utama**

**: Hasbi Sidik, S.IP., M.A.**



**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.**

**NIP. 196108071980032001**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 12 Juni 2026**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan mencantumkannya dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

BandarLampung, 12 Juni 2026  
Yang membuat pernyataan



**Azzahra Ferica Efendi**  
NPM. 2256071006

## RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Bandung pada tanggal 29 Februari 2004 dari pasangan Kuswanto dan Nurhayati sebagai anak ketiga. Jenjang pendidikan penulis ditempuh mulai dari Taman Kanak-Kanak 1 Sripendowo, kemudian melanjutkan pendidikan formal pertama di SD Negeri 2 Sripendowo dan lulus pada tahun 2016, selanjutnya melanjutkan ketingkat menengah pertama di SMP Negeri 1 Ketapang dan lulus pada tahun 2019, penulis juga sempat melanjutkan tingkat menengah atas di SMA 8 PASUNDAN jurusan Ilmu Pengetahuan Alam selama 2 tahun lalu memutuskan untuk pindah ke SMAN 1 Ketapang dengan jurusan yang sama dan lulus pada tahun 2022. Kemudian pada tahun 2022 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional di Universitas Lampung.

**MOTTO**

*"It Always Seems Impossible Until It's Done"*

**- Nelson Mandela**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan segenap puji serta syukur atas kehadiran Allah  
SWT.

Saya persembahkan Skripsi ini

kepada:

Allah SWT yang selalu memberikan, melimpahkan, dan mencurahkan  
berkah juga rahmat-Nya kepada Penulis sehingga memberikan kemudahan  
dan kelancaran dalam menyaksikan penelitian skripsi ini dengan baik.

### **Bapak Kuswanto dan Ibu Nurhayati**

Tulisan ini sebagai wujud tanda terima kasih dan kewajibanku sebagai  
seorang anak kepada kalian para orang tua penulis. Terimakasih atas doa,  
kasih sayang, kesabaran, semangat, serta dukungan ambisi yang besar  
untuk membangun motivasi dalam diriku hingga saat ini.

Terimakasih kepada seluruh keluarga besarku yang selalu mendoakan juga  
mendukung segala aspek kehidupan agar mencapai kesuksesan dan  
keberhasilan.

### **Diri Sendiri**

Terimakasih sudah bertahan dan selalu menemukan kekuatan untuk  
berproses menjadi Azzahra Ferica Efendi. Tidak pernah menyerah dan  
putus asa untuk menghadapi masalah kehidupan dan menyelesaikan  
perkuliahan.

Serta

**Universitas Lampung**

## SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang sudah memberi hidayah, rahmat, serta anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berjudul **“Operasi Perdamaian UNAMA dalam Hak Perempuan di Afghanistan Era Taliban 2021-2025”** sebagai prasyarat menyelesaikan Program Sarjana Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Penulis sadar bahwasannya skripsi ini tidak akan selesai apabila tidak ada bimbingan, bantuan, dukungan, dan nasihat dari banyak pihak. Pada kesempatan ini, ucapan terima kasih setulus-tulusnya penulis sampaikan pada:

1. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung;
2. Bapak Simon Sumanjoyo H, S.AN., M.PA., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung;
3. Ibu Gita Kharisma, S.IP., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Pembimbing Utama Penulis yang selalu mengayomi, membimbing, membantu, dan juga sabar dalam mengajari penulis selama bimbingan skripsi ini;
4. Bapak Hasbi Sidik, S.IP., M.A., selaku Dosen Penguji yang senantiasa memberi masukan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen, Staff, dan Tenaga Kerja Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah banyak membantu dan mempermudah untuk mempermudah Penulis untuk mengurus semua kegiatan dan telah meluangkan waktunya untuk Penulis berkonsultasi terkait semua aktivitas perkuliahan;

6. Kedua orang tua penulis Papa dan Mama, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis, dua orang yang selalu mengusahakan anak ketiganya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Kepada Papa, terima kasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah demi anakmu bisa sampai kepada tahap ini, demi anakmu dapat mengenyam pendidikan sampai ke tingkat ini. Untuk Mama, terima kasih atas segala motivasi, pesan, doa, dan harapan yang selalu mendampingi setiap langkah dan ikhtiar anakmu untuk menjadi seseorang yang berpendidikan, terima kasih atas kasih sayang tanpa batas yang tak pernah lekang oleh waktu, atas kesabaran dan pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup penulis, terima kasih telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Terakhir, terima kasih atas segala hal yang kalian berikan yang tak terhitung jumlahnya;
7. Penulis mengucapkan terima kasih kepada kakak penulis, Jiko Kuswanto yang telah banyak membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, terutama dalam membantu pencetakan berbagai dokumen yang diperlukan. Kepada kakak ipar penulis, Imas Septiani penulis mengucapkan terima kasih atas segala dukungan dan perhatian yang diberikan. Terima kasih juga kepada kakak penulis, Ayuni Nuritna Sari atas motivasi, dukungan, dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis. Ucapan terima kasih turut penulis sampaikan kepada kakak ipar penulis, Sindu Tangguh Dewanto atas dukungan yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih juga kepada kakak sepupu penulis, Daryanti yang telah memberikan dukungan serta membantu penulis dalam mengurus berbagai keperluan pencetakan dokumen selama proses penyusunan skripsi. Terakhir, kepada adik penulis, Yulia Nuritna Sari, terimakasih atas dukungan dan semangat yang senantiasa diberikan kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat penulis sejak masa awal perkuliahan, Hanisa Dika Aprilia dan Monic Altariswan yang telah menjadi teman seperjuangan sejak menjadi mahasiswa baru. Terima kasih atas dukungan, kebersamaan, motivasi, serta berbagai pengalaman yang telah dibagikan selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan hingga proses

penyusunan skripsi ini. Kehadiran dan dukungan mereka menjadi salah satu penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan studi.

9. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada rekan magang penulis, Zefanya Pangaribuan, Fiqri Qurahman, dan I Made Surya yang telah menjadi teman selama menjalani kegiatan magang selama enam bulan sampai saat ini. Terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, dukungan, serta berbagai pengalaman dan pembelajaran yang telah dibagikan selama masa magang. Kehadiran mereka memberikan banyak kesan positif dan menjadi bagian yang berharga dalam perjalanan akademik maupun pengembangan diri penulis;
10. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan KKN, Arvian Muhammad Fattasyah, Dian Azzahra, Shinthia Wulandari, Reza Saputra, Sanjaya Martua Hutasoit, serta Shintia Wulandari atas kebersamaan, kerja sama, dan dukungan selama pelaksanaan kegiatan KKN. Penulis sangat mengapresiasi pengalaman, pembelajaran, serta momen kebersamaan yang telah dilalui bersama selama kegiatan tersebut berlangsung.
11. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat penulis sejak bangku Sekolah Menengah Pertama, Kadek Dwi Andriani atas kebersamaan, dukungan serta persahabatan yang telah terjalin hingga saat ini. Terima kasih atas segala bantuan, semangat, dan kenangan yang menjadi bagian berharga dalam perjalanan hidup penulis.
12. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Meitia Amanda yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan serta memberikan masukan dalam proses penulisan skripsi ini. Masukan, dukungan, dan perhatian yang diberikan sangat membantu penulis dalam menyempurnakan penyusunan skripsi hingga dapat terselesaikan dengan baik.
13. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Dewi Septiani Fauzi, Viona Sufai Faizal, Desylfa Ika Shervia, dan Nabila Khaira Arisna atas segala dukungan, semangat, serta perhatian yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran dan dukungan menjadi salah satu sumber motivasi penting bagi penyelesaian karya ilmiah ini.

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	7
2.2 Landasan Teori .....	11
2.2.1 Konflik .....	11
2.2.2 Peacebuilding Operations .....	14
<b>III. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>20</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	20
3.2 Fokus Penelitian .....	21
3.3 Sumber Data .....	21
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	22
3.5 Teknik Analisis Data .....	22
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>24</b>
4.1 Sejarah dan keterlibatan UNAMA di Afghanistan .....	24
4.1.1 Sejarah Terbentuknya UNAMA .....	25
4.1.2 Operasi Perdamaian di Afghanistan .....	28

4.1.3	Pelanggaran Hak Perempuan di Afghanistan.....	32
4.2	Peran UNAMA dalam Perlindungan Hak Perempuan di Afghanistan ...	41
4.2.1	Advokasi .....	42
4.2.2	Pemberdayaan Perempuan .....	46
4.2.3	Pendampingan dan Perlindungan.....	51
4.2.4	Hambatan UNAMA dalam Perlindungan Hak Perempuan di Afghanistan.....	57
<b>V.</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>61</b>
5.1	Kesimpulan .....	61
5.2	Saran .....	64
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>66</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1 Jumlah Perempuan dan Anak Perempuan Terdampak Pelanggaran HAM di Afghanistan Pasca-2021.....	3
Gambar 2 Kerangka Pemikiran.....	21
Gambar 3 Alasan tidak menyelesaikan sekolah menengah dikalangan gadis Afghanistan.....	34
Gambar 4 Jumlah perempuan dan anak perempuan terdampak pembatasan hak di Afghanistan.....	34
Gambar 5 Perbandingan Data Enrolment Pendidikan Menengah Perempuan Afghanistan dengan Kondisi Aktual Pasca-2021.....	35
Gambar 6 Dampak Larangan Kerja Taliban terhadap Operasional NGO di Afghanistan Tahun 2023.....	37
Gambar 7 Perempuan Afghanistan Menggunakan Burqa di Ruang Publik.....	39

**DAFTAR TABEL**

Tabel	Halaman
Tabel 1 Komparasi penelitian.....	11

**DAFTAR SINGKATAN**

PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
UNAMA	: United Nations Assistance Mission in Afghanistan
HAM	: Hak Asasi Manusia
CIA	: Central Intelligence Agency
ANSF	: Pasukan Keamanan Nasional Afghanistan
ISAF	: International Security Assistance Force
UPR	: Universal Periodic Review
ICG	: International Crisis Group
UNESCO	: United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organizations

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

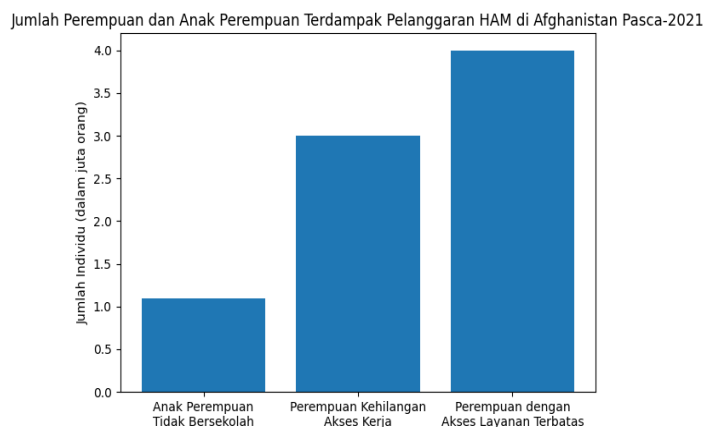
Afghanistan berada di kawasan Asia Selatan dan Asia Tengah serta memiliki posisi geopolitik yang strategis sebagai wilayah penghubung antara Timur Tengah, Asia Tengah, dan Asia Selatan. Dari sisi demografis, berdasarkan data Central Intelligence Agency (CIA), lebih dari 99% penduduk Afghanistan beragama Islam (Sasakawa Peace foundation 2023). Kondisi geopolitik dan demografis tersebut kemudian berkaitan dengan konflik berkepanjangan yang bermula dari intervensi militer Uni Soviet pada tahun 1979 untuk mendukung pemerintah komunis Afghanistan, yang memicu perlawanan bersenjata dari kelompok mujahidin. Setelah penarikan pasukan Uni Soviet pada 1989, Afghanistan mengalami kekosongan kekuasaan sehingga menyebabkan konflik sipil bersenjata dan perebutan kekuasaan di Afghanistan, sehingga kelompok mujahidin terpecah menjadi faksi – faksi yang menjadi pemicu adanya perang saudara (Salindri et al. 2024). Dalam kondisi anarki politik serta ketidakmampuan negara dalam menjamin keamanan dan ketertiban sosial, Taliban muncul pada tahun 1994 sebagai aktor politik berbasis Islam yang menawarkan penegakan otoritas dan pengendalian keamanan sebagai respons terhadap situasi kekacauan yang berkepanjangan (Pote and Subandi 2025).

Dalam situasi instabilitas yang berkepanjangan, komunitas internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, mulai terlibat untuk merespons krisis kemanusiaan dan menjaga stabilitas politik di Afghanistan. Keterlibatan ini diwujudkan melalui berbagai misi internasional yang bertujuan untuk mendukung proses transisi politik, menjaga keamanan, serta

memperkuat institusi negara (Country 2022). Pada fase awal, pendekatan yang digunakan cenderung berorientasi pada stabilitasi keamanan melalui dukungan militer internasional seperti ISAF (Murphy et al. 2021). Namun, seiring berjalannya waktu, pendekatan tersebut berkembang ke arah yang lebih komprehensif yang mencakup aspek politik dan kemanusiaan. Perubahan pendekatan ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tidak hanya dapat dilakukan melalui kekuatan militer, tetapi juga melalui upaya pembangunan perdamaian jangka panjang (Koops and Dal 2025).

Perubahan terbesar terjadi pada tahun 2021 ketika Taliban kembali mengambil alih kekuasaan setelah penarikan pasukan internasional dari Afghanistan. Peristiwa ini menandai berakhirnya dominasi pendekatan militer internasional dan memperkuat peran misi politik dalam merespon situasi di Afghanistan (Murphy et al. 2021). Dalam konteks ini, United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) menjadi aktor utama yang mewakili kehadiran Perserikatan Bangsa-Bangsa di Afghanistan (UNAMA 2025). UNAMA tidak beroperasi sebagai misi militer, melainkan sebagai misi politik yang berfokus pada pemantauan kondisi politik dan kemanusiaan. Peran ini menjadikan UNAMA sebagai instrument penting dalam menjaga keterlibatan internasional di tengah keterbatasan situasi domestik.

Di antara berbagai kelompok masyarakat, perempuan menjadi kelompok yang paling terdampak oleh perubahan kebijakan pasca-2021. Laporan UN Women menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan muda di Afghanistan mengalami keterbatasan dalam akses pendidikan, pekerjaan, dan pelatihan (UN WOMEN 2024). Kondisi tersebut mencerminkan penyempitan ruang partisipasi perempuan yang terjadi secara sistematis dalam kehidupan sosial. Selain itu, pembatasan terhadap mobilitas dan aktivitas perempuan menunjukkan adanya kontrol sosial yang semakin ketat terhadap kehidupan mereka (UNAMA 2022). Dengan demikian, situasi ini menandai kemunduran serius dalam pemenuhan hak-hak dasar perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia.



Gambar 1 Jumlah Perempuan dan Anak Perempuan Terdampak Pelanggaran HAM di Afghanistan Pasca-2021

Sumber: (UN WOMEN 2024; UNAMA 2022) diolah oleh penulis

Kondisi pelanggaran hak perempuan di Afghanistan setelah kembalinya Taliban pada 2021 tercermin secara kuantitatif melalui jurnal *Gender Country Profile Afghanistan* serta laporan UNAMA dan UN Women yang menggambarkan luasnya dampak kebijakan pembatasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Data tersebut menunjukkan sekitar 1,1 juta anak perempuan terputus dari pendidikan menengah sebagai akibat langsung dari larangan bersekolah bagi perempuan yang berdampak pada terbatasnya peluang pengembangan diri dan masa depan mereka. Dalam sektor ekonomi, sekitar 3 juta perempuan mengalami penyempitan akses terhadap pekerjaan, terutama akibat pembatasan peran perempuan di sektor publik, organisasi kemanusiaan, dan media. Selain itu, kurang lebih 4 juta perempuan menghadapi hambatan dalam memperoleh layanan kesehatan, bantuan sosial, dan kemanusiaan yang dipengaruhi oleh pembatasan mobilitas serta ketergantungan pada pendampingan anggota keluarga laki-laki. Secara keseluruhan data ini menunjukkan bahwa ketimpangan dan pelanggaran terhadap hak-hak perempuan di Afghanistan bersifat sistematis dan berakar kuat dalam struktur sosial yang menguat sejak perubahan kekuasaan pada tahun 2021 (UN WOMEN 2024).

Dalam situasi dimana negara memiliki keterbatasan dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia, UNAMA menjalankan perannya melalui

berbagai fungsi strategis yang berfokus pada perlindungan masyarakat sipil. Peran tersebut meliputi pemantauan dan pelaporan pelanggaran hak asasi manusia, advokasi terhadap perlindungan kelompok rentan, serta koordinasi dengan aktor kemanusiaan internasional (UNAMA 2025). Dalam praktiknya, UNAMA juga berupaya menjaga perhatian komunitas internasional terhadap kondisi perempuan di Afghanistan melalui publikasi laporan dan diplomasi kemanusiaan. Namun, pelaksanaan mandat tersebut dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses dan dinamika politik di bawah pemerintahan *de facto* (Hunt and Day 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa peran UNAMA tidak hanya penting, tetapi juga kompleks dalam implementasinya.

Dalam kajian hubungan internasional, keterlibatan UNAMA dapat dipahami melalui pendekatan *peacebuilding operations* yang berfokus pada penciptaan perdamaian berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan pada penghentian konflik, tetapi juga ada perlindungan hak asasi manusia dan penguatan struktur sosial (Ahmadzai 2024). Dalam konteks Afghanistan pasca-2021, *peacebuilding* menjadi relevan karena konflik tidak lagi bersifat terbuka, tetapi berubah menjadi pembatasan struktural terhadap masyarakat. Oleh karena itu, peran UNAMA perlu dianalisis tidak hanya sebagai pelaksana mandate PBB, tetapi juga sebagai aktor *peacebuilding* yang berupaya mencegah memburuknya kondisi kemanusiaan. Dengan demikian, penelitian ini penting untuk mengkaji bagaimana UNAMA menjalankan perannya dalam melindungi hak perempuan periode 2021-2025.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas kondisi hak asasi manusia di Afghanistan serta peran komunitas internasional dalam merespons konflik, sebagian besar kajian masih berfokus pada analisis umum mengenai pelanggaran HAM atau dinamika politik pasca-kembali Taliban. Penelitian terdahulu juga cenderung menyoroati aspek kebijakan Taliban atau kondisi kelompok rentan tanpa mengkaji secara spesifik bagaimana peran misi politik PBB dijalankan dalam kerangka *peacebuilding operations*. Selain itu, kajian yang secara khusus mengaitkan fungsi pemantauan, pelaporan, dan advokasi UNAMA dengan perlindungan hak perempuan pada periode pasca-2021

masih terbatas. Padahal, perubahan pendekatan dari intervensi militer ke misi politik menjadi UNAMA sebagai aktor kunci dalam menjaga isu kemanusiaan tetap berada dalam perhatian internasional. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis peran UNAMA dalam perlindungan hak perempuan di Afghanistan era Taliban 2021-2025 dalam perspektif peacebuilding operations.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menyoroti permasalahan terkait memburuknya kondisi hak asasi manusia di Afghanistan sejak kembalinya Taliban ke tampuk kekuasaan pada tahun 2021. Berbagai pembatasan terhadap hak perempuan menunjukkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia terjadi secara sistematis dan berkelanjutan. Kondisi ini tidak hanya memicu krisis kemanusiaan, tetapi juga semakin menyempitkan ruang sipil bagi masyarakat Afghanistan. Dalam situasi demikian, peran aktor internasional menjadi krusial dalam upaya pemantauan, pelaporan, dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, dinamika politik di bawah pemerintahan de facto Taliban memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana efektivitas keterlibatan komunitas internasional dalam merespons permasalahan tersebut.

Pasca kembalinya Taliban pada tahun 2021, *United Nations Assistance Mission in Afghanistan* (UNAMA) tetap menjalankan perannya sebagai misi politik khusus PBB di Afghanistan. UNAMA memiliki peranan penting dalam pemantauan serta pendokumentasian pelanggaran hak asasi manusia sebagai bagian dari upaya peacebuilding operations. Namun pelaksanaan mandat tersebut dihadapkan pada berbagai kendala, seperti keterbatasan akses lapangan, resistensi dari otoritas Taliban, serta tidak adanya pengakuan internasional terhadap pemerintahan de facto menjadi tantangan serius dalam pelaksanaan mandat tersebut. Kondisi ini menimbulkan keraguan mengenai tingkat efektivitas operasi perdamaian UNAMA dalam kondisi politik yang semakin terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan permasalahan

mengenai: **“Bagaimana peran peacebuilding operation yang dilakukan oleh perdamaian UNAMA dalam perlindungan hak perempuan di Afghanistan era Taliban 2021-2025?”**.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan keterlibatan dan perkembangan operasi perdamaian UNAMA di Afghanistan era Taliban 2021-2025
2. Menjelaskan operasi peacebuilding yang dilakukan UNAMA dalam perlindungan hak perempuan di Afghanistan era Taliban 2021-2025

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi mengenai pemahaman operasi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berfokus pada perlindungan hak perempuan. Dengan menjadikan UNAMA sebagai objek kajian, penelitian ini mengkaji pelaksanaan peacebuilding operations dalam konteks negara yang berada di bawah pemerintahan de facto pasca kembalinya Taliban tahun 2021-2025. Selain itu, hasil kajian ini dapat digunakan sebagai rujukan analitis untuk memahami berbagai kendala struktural dan dinamika politik yang memengaruhi implementasi mandat perlindungan hak asasi manusia di Afghanistan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penulis mengkaji lima penelitian terdahulu yang relevan sebagai rujukan utama dalam penyusunan penelitian berjudul Operasi Perdamaian UNAMA dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia di Afghanistan pada Era Taliban 2021–2025. Salah satu rujukan tersebut adalah penelitian yang ditulis oleh Philip Alston, yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan teori Liberalisme.

Penelitian ini mengkaji rezim hak asasi manusia internasional secara menyeluruh dengan pendekatan kritis, meliputi perkembangan norma hukum, kelembagaan, dinamika praktik politik, serta perdebatan etis yang memengaruhi sekaligus menantang upaya perlindungan HAM sejak periode pasca-Perang Dunia II hingga isu-isu mutakhir. Selain itu, kajian ini menyoroti struktur institusional HAM di tingkat global, khususnya sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk Dewan HAM, mekanisme Prosedur Khusus, badan-badan perjanjian, sistem pelaporan negara, Universal Periodic Review (UPR), serta mekanisme pencarian fakta.

Jurnal kedua yang penulis gunakan adalah jurnal berjudul *“Afghanistan: Minorities, Conflict and the Search for Peace”* yang ditulis oleh International Crisis Group (ICG). Penelitian ini membahas isu Politik Internasional dengan fokus pada kondisi kelompok minoritas di Afghanistan dalam konteks konflik berkepanjangan dan upaya pencarian perdamaian. Jurnal ini menjelaskan secara rinci latar belakang kelompok minoritas etnis dan agama di Afghanistan, seperti Hazara, Tajik, Uzbek, dan Ismailiyah, yang secara historis mengalami diskriminasi dan kekerasan. Selain itu, jurnal ini

menguraikan awal mula konflik Afghanistan yang tidak hanya dipicu oleh faktor politik dan keamanan, tetapi juga oleh ketegangan etnis dan sektarian yang semakin memperburuk posisi minoritas. Penulis memaparkan dinamika konflik yang melibatkan berbagai aktor, termasuk Taliban dan kelompok bersenjata lainnya, serta dampaknya terhadap perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini berfokus pada bagaimana kelompok minoritas sering kali terpinggirkan dalam proses perdamaian Afghanistan, sehingga perdamaian yang dihasilkan cenderung tidak inklusif.

Dalam jurnal ini juga dijelaskan pentingnya pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam membangun perdamaian yang berkelanjutan, serta peran komunitas internasional dalam mendorong perlindungan minoritas. Penelitian ini menggunakan konsep Hak Asasi Manusia dan peacebuilding, dengan pendekatan kualitatif yang menganalisis konflik dan proses perdamaian secara deskriptif-analitis. Kekurangan dari penelitian ini adalah belum adanya pembahasan mendalam mengenai mekanisme implementasi perlindungan minoritas secara konkret di tingkat nasional Afghanistan.

Jurnal ketiga penelitian ini ditulis oleh Zakia Adeli pada tahun 2024 yang membahas dampak kebijakan Taliban terhadap kondisi hak asasi manusia di Afghanistan pasca pengambilalihan kekuasaan pada Agustus 2021. Penelitian ini berfokus pada bagaimana kebijakan Taliban menyebabkan kemunduran signifikan dalam pemenuhan hak-hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial, dan budaya warga Afghanistan. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa penghapusan Konstitusi Afghanistan 2004 dan pembubaran institusi negara telah menciptakan kekosongan hukum yang memicu meningkatnya pelanggaran HAM, khususnya terhadap perempuan, kelompok etnis, dan minoritas agama. Penelitian ini juga menguraikan berbagai bentuk pelanggaran, seperti pembatasan partisipasi politik, pembatasan kebebasan berekspresi, kekerasan terhadap warga sipil, serta pelarangan akses pendidikan dan pekerjaan bagi perempuan.

Penelitian ini memaparkan kebijakan Taliban dan implikasinya terhadap perlindungan HAM dengan menggunakan kerangka hak asasi

manusia yang mengacu pada klasifikasi hak sipil-politik dan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode dokumenter, melalui analisis laporan internasional, dokumen PBB, serta temuan organisasi HAM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun konflik bersenjata menurun setelah Taliban berkuasa, kondisi HAM justru memburuk secara sistematis. Kelemahan dari penelitian ini adalah tidak adanya indikator kuantitatif yang terukur untuk menilai tingkat pelanggaran HAM secara komparatif dari waktu ke waktu.

Jurnal keempat penulis menggunakan laporan oleh Human Rights Watch, 2025. Penelitian ini berfokus pada kondisi dan perkembangan pelanggaran hak asasi manusia di berbagai negara sepanjang pertengahan tahun 2025. Implementasi perlindungan HAM yang konsisten dan komitmen negara menjadi faktor penting dalam menjamin keamanan dan keberlangsungan hidup masyarakat sipil. Dalam laporan ini dijelaskan bahwa pelanggaran HAM tidak hanya terjadi dalam konteks konflik bersenjata, tetapi juga dalam situasi politik represif, pembatasan kebebasan sipil, serta lemahnya supremasi hukum. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan negara, organisasi internasional, dan masyarakat sipil dalam menangani isu HAM. Laporan ini juga menjelaskan praktik pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara, termasuk pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi terhadap kelompok rentan, serta kekerasan berbasis politik. Metode yang digunakan dalam laporan ini bersifat kualitatif dengan mengandalkan pemantauan lapangan, dokumentasi kasus, serta analisis data pendukung dari berbagai sumber. Kekurangan dari laporan ini adalah tidak adanya evaluasi mendalam terkait efektivitas mekanisme internasional dalam menghentikan atau mengurangi pelanggaran HAM yang terjadi.

Pada jurnal kelima, penulis menggunakan penelitian oleh Sayed Ahmad Sharifi dan Masood Karokhail. Penelitian ini berfokus pada hubungan antara proses peacebuilding dan kondisi kerapuhan negara di Afghanistan. Implementasi strategi peacebuilding yang tidak hanya berorientasi pada keamanan, tetapi juga pada pembangunan institusi dan legitimasi politik,

dinilai penting untuk menciptakan stabilitas jangka panjang. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa konflik Afghanistan tidak semata-mata disebabkan oleh kekerasan bersenjata, melainkan juga oleh lemahnya tata kelola pemerintahan, krisis legitimasi negara, serta kegagalan pembangunan pascakonflik. Oleh karena itu, pendekatan peacebuilding yang komprehensif dan terintegrasi antara aspek keamanan, pembangunan, dan politik menjadi sangat diperlukan. Jurnal ini juga menjelaskan praktik peacebuilding internasional di Afghanistan beserta berbagai tantangan struktural yang dihadapi, seperti korupsi, fragmentasi elit politik, dan keterbatasan kapasitas institusi negara. Penelitian ini menggunakan konsep peacebuilding dan state fragility dengan pendekatan kualitatif yang didasarkan pada analisis kebijakan, dokumen resmi, serta data pendukung lainnya. Kekurangan dari penelitian ini adalah belum memberikan solusi operasional yang konkret untuk mengatasi kerapuhan negara dalam konteks konflik Afghanistan yang terus berubah.

No	Penulis	Judul	Teori/Konsep	Tujuan Penelitian	Fokus Penelitian
1	Philip Alston	International Human Rights, 2025	Liberalisme	Memberikan pemahaman menyeluruh tentang HAM internasional	Instuisi HAM global dan regional
2	International Crisis Group (ICG)	Afghanistan: Minorities, Conflict and the Search for Peace	Peacebuilding dan Human Security Approach	Menganalisis posisi dan pengalaman kelompok minoritas dalam konflik Afghanistan	Kondisi dan kerentanan minoritas etnis dan agama (Hazara, Ismaili, Sikh, Hindu, dll.)
3	Zakia Adeli	The Consequences of Taliban Policies on Human Rights in Afghanistan (August 2021–August 2023)	Klasifikasi HAM Stephen Marks	Menganalisis dampak kebijakan Taliban terhadap HAM warga Afghanistan	Peran dan kebijakan Taliban sebagai otoritas de facto (2021–2023)
4	Human Rights Watch	World Report 2025: Mid-	Human Security	Menilai dampak kebijakan	Pelanggaran HAM sistematis oleh

	(HRW)	Year Update		Taliban terhadap HAM sepanjang paruh pertama 2025	Taliban
5	AE Abdenur & S Tripathi (2022)	Peacebuilding and State Fragility in Afghanistan	Peacebuilding	Menganalisis hubungan antara peacebuilding dan kerapuhan negara di Afghanistan	Proses peacebuilding pascakonflik di Afghanistan

Tabel 1 Komparasi penelitian

Sumber: diolah oleh penulis

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Konflik

Dalam kajian hubungan internasional, konflik dipahami sebagai kondisi pertentangan yang muncul akibat perbedaan kepentingan, nilai, tujuan, maupun relasi kekuasaan antara aktor-aktor yang terlibat. Konflik tidak selalu diwujudkan dalam bentuk kekerasan bersenjata, melainkan juga dapat muncul melalui ketegangan politik, dominasi struktural, dan kebijakan yang mencerminkan ketimpangan kekuasaan. Dengan demikian, konflik mencerminkan proses interaksi yang tidak seimbang antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda dalam suatu sistem politik atau sosial. Pemahaman ini menempatkan konflik sebagai fenomena yang bersifat dinamis dan kontekstual, bukan sekedar peristiwa temporer. Oleh karena itu, konflik perlu dilihat sebagai bagian dari proses yang membentuk dinamika politik, stabilitas negara, dan kondisi kemanusiaan (Idagu 2025).

Dalam situasi negara pasca konflik, berakhirnya kekerasan bersenjata atau tercapainya kesepakatan damai tidak serta merta menandai berakhirnya konflik secara menyeluruh. Konflik sering kali mengalami perubahan bentuk konfrontasi terbuka menjadi ketegangan laten yang tertanam dalam struktur politik, tata kelola pemerintahan, dan institusi negara. Ketidakmerataan distribusi kekuasaan, kelemahan kapasitas institusional, serta minimnya

mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban memperpanjang dinamika konflik pada fase ini. Pada kondisi tersebut, konflik lebih banyak tercermin melalui praktik kebijakan yang eksklusif, pengucilan kelompok tertentu, serta pembatasan ruang partisipasi politik masyarakat. Oleh karena itu, negara pasca konflik tetap menghadapi kerentanan terhadap instabilitas apabila penyebab mendasar konflik tidak ditangani secara komprehensif (Campbell and Matanock 2024).

Konflik yang berlangsung lama di Afghanistan menunjukkan pola yang kompleks karena melibatkan dimensi ideologis, politik, serta persaingan dalam penguasaan otoritas negara. Perbedaan cara pandang mengenai bentuk pemerintahan, penerapan hukum, dan pengaturan kehidupan sosial berkontribusi besar terhadap berlanjutnya ketegangan di berbagai lapisan masyarakat. Keberadaan Taliban sebagai aktor non negara yang dominan turut memengaruhi arah konflik, tidak hanya melalui kekuatan militer, tetapi juga melalui pengendalian struktur politik dan sosial (Zulkarnain et al. 2023). Situasi ini diperparah oleh kapasitas institusional negara yang terbatas serta belum terbentuk sistem pemerintahan yang inklusif dan memiliki legitimasi luas (Setiawati 2025). Dampaknya, konflik berkepanjangan di Afghanistan terus memengaruhi stabilitas politik, keamanan nasional, dan kondisi kehidupan masyarakat sipil secara berkelanjutan.

Konflik yang terus berlanjut di Afghanistan telah menimbulkan konsekuensi serius terhadap kondisi dan pemenuhan hak asasi manusia. Kerapuhan kelembagaan negara yang disertai dengan pemusatan kekuasaan pada satu pihak menyebabkan sistem perlindungan hak-hak dasar masyarakat tidak berfungsi secara optimal. Dalam situasi konflik yang berkepanjangan, pembatasan terhadap kebebasan sipil dan politik semakin dianggap sebagai praktik yang wajar dalam kerangka kebijakan keamanan dan pengendalian sosial (Human Rights Watch 2025). Kondisi tersebut berdampak paling besar pada kelompok masyarakat yang berada dalam posisi rentan, termasuk perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas. Dengan demikian, persoalan hak asasi manusia menjadi elemen kunci dalam menganalisis dampak konflik

sekaligus menegaskan kebutuhan akan upaya perlindungan dan pemulihan yang melibatkan aktor di luar negara (Afzal 2024).

Keberlanjutan konflik di Afghanistan menunjukkan kemampuan negara dalam mempertahankan stabilitas politik dan menjamin perlindungan hak asasi manusia secara memadai (Asdiarti and Burhanuddin 2024). Kelemahan struktur kelembagaan serta rendahnya tingkat legitimasi pemerintahan menyebabkan negara tidak mampu merespons dampak konflik secara menyeluruh (Suharto and Apriyani 2022). Kondisi tersebut membuka ruang bagi keterlibatan aktor internasional untuk menjalankan fungsi pemantauan, advokasi, dan penyaluran bantuan kemanusiaan (Pote and Subandi 2025). Dalam kondisi yang berkepanjangan, organisasi internasional berperan penting dalam menjaga perhatian komunitas global terhadap dinamika konflik dan persoalan kemanusiaan yang terjadi. Dengan demikian, kehadiran PBB melalui *United Nations Assistance Mission in Afghanistan* (UNAMA) menjadi relevan sebagai mekanisme internasional dalam merespons konflik serta implikasinya terhadap hak asasi manusia di Afghanistan.

Berdasarkan kelima penelitian terdahulu tersebut, terdapat persamaan dalam menempatkan isu hak asasi manusia dan peacebuilding sebagai aspek penting dalam memahami dinamika konflik di Afghanistan. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada analisis kondisi umum HAM, kebijakan Taliban, serta kerentanan kelompok tertentu tanpa mengkaji secara spesifik peran aktor internasional dalam implementasi perlindungan tersebut. Selain itu, kajian mengenai peacebuilding cenderung menitikberatkan pada aspek struktural dan institusional tanpa mengaitkannya secara langsung dengan fungsi operasional misi politik seperti UNAMA. Perbedaan inilah yang menjadi dasar bagi penelitian untuk mengkaji secara lebih spesifik bagaimana peran UNAMA dijalankan dalam perlindungan hak perempuan dalam kerangka peacebuilding operations. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melengkapi kajian sebelumnya, tetapi juga memberikan perspektif yang lebih terfokus pada peran aktor internasional dalam konteks *de facto*.

### 2.2.2 Peacebuilding Operations

Peacebuilding operations dalam kajian hubungan internasional dipahami sebagai serangkaian upaya yang bertujuan menciptakan perdamaian berkelanjutan dengan menangani faktor-faktor mendasar penyebab konflik. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penghentian kekerasan secara langsung, tetapi juga pada pembenahan struktur politik, sosial, dan institusional yang menopang stabilitas jangka panjang. Perdamaian dalam kerangka peacebuilding tidak dimaknai sekadar sebagai ketiadaan perang, melainkan sebagai kondisi dimana keamanan, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia dapat terjamin. Oleh karena itu, peacebuilding operations menekankan pentingnya transformasi kondisi pasca konflik agar konflik serupa tidak kembali muncul. Pendekatan ini banyak digunakan untuk menganalisis situasi negara-negara yang mengalami konflik berkepanjangan atau berada dalam fase pasca konflik (Ahmadzai 2024).

Berbeda dengan pendekatan keamanan tradisional yang menitikberatkan pada penggunaan kekuatan militer, peacebuilding operations lebih menekankan perubahan struktural dan penguatan institusional. Dalam kerangka ini, pembangunan institusi pemerintahan yang efektif, penegakan supermasi hukum, serta perlindungan hak asasi manusia menjadi unsur yang paling berkaitan. Pembatasan terhadap hak-hak dasar masyarakat dipandang sebagai faktor yang dapat memperbesar risiko konflik berulang apabila tidak ditangani secara sistematis. Oleh karena itu, peacebuilding operations mengintegrasikan dimensi politik, sosial, dan kemanusiaan dalam satu kerangka intervensi yang komprehensif. Pendekatan ini menjadi relevan ketika negara tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk mengelola dampak konflik secara mandiri (Ahmadzai 2024).

Dalam perspektif Perserikatan Bangsa-Bangsa, peacebuilding operations diposisikan sebagai komponen penting dalam upaya menjaga perdamaian dan keamanan internasional secara berkelanjutan (Hansen 2025). PBB memandang peacebuilding sebagai proses yang berlangsung dalam jangka panjang dan dirancang untuk mencegah kembalinya konflik setelah kekerasan bersenjata mereda (Helder Nhamaze et al. 2022). Pendekatan ini

menekankan pentingnya stabilitas politik, penguatan institusi negara, serta pembangunan kapasitas sosial sebagai fondasi perdamaian berkelanjutan (Sulaiman et al. 2024). Seiring dengan meningkatnya kompleksitas konflik global, PBB mengembangkan peacebuilding yang tidak hanya berorientasi pada stabilitas keamanan, tetapi juga pada penguatan tata kelola pemerintahan dan perlindungan hak asasi manusia (Hansen 2025). Dengan demikian, peacebuilding operations menjadi sarana strategis PBB dalam menghadapi konflik multidimensional di negara-negara pasca konflik (Sulaiman et al. 2024).

Dalam praktik peacebuilding operations, advokasi merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan untuk mendorong perlindungan kelompok rentan dan menciptakan perubahan kebijakan yang mendukung perdamaian berkelanjutan. Advokasi tidak hanya dilakukan melalui penyampaian kritik terhadap pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga melalui upaya memengaruhi pengambilan keputusan politik, peningkatan kesadaran publik, serta penyampaian rekomendasi kepada pihak yang berwenang. Dalam konteks organisasi internasional, advokasi dilakukan melalui mekanisme pemantauan, pelaporan, dialog politik, dan penyampaian rekomendasi kepada pemerintah maupun aktor yang terlibat dalam konflik. Melalui advokasi, aktor internasional berupaya memastikan bahwa isu-isu kemanusiaan dan perlindungan kelompok rentan tetap menjadi perhatian utama dalam proses pembangunan perdamaian. Oleh karena itu, advokasi menjadi bagian penting dalam peacebuilding operations karena berfungsi sebagai sarana untuk mendorong penghormatan terhadap hak-hak dasar masyarakat serta mencegah terjadinya pelanggaran yang berulang.

Selain advokasi, perlindungan hak asasi manusia merupakan elemen utama dalam peacebuilding operations karena perdamaian yang berkelanjutan tidak dapat terwujud tanpa adanya jaminan terhadap hak-hak dasar masyarakat. Dalam perspektif peacebuilding, perlindungan hak asasi manusia mencakup berbagai upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran, memberikan perhatian terhadap kelompok rentan, serta mendorong akuntabilitas atas tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip

kemanusiaan. Perlindungan hak asasi manusia juga berfungsi sebagai langkah pencegahan konflik karena berbagai bentuk diskriminasi, ketidakadilan, dan pelanggaran hak sering kali menjadi faktor yang memicu ketegangan sosial maupun politik. Oleh sebab itu, peacebuilding operations menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu fondasi penting dalam menciptakan stabilitas sosial dan politik yang berkelanjutan.

Peacebuilding operations juga menekankan pentingnya pemberdayaan (empowerment) sebagai upaya meningkatkan kapasitas individu maupun kelompok masyarakat yang terdampak konflik. Pemberdayaan tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan kemampuan ekonomi, tetapi juga mencakup peningkatan akses terhadap pendidikan, informasi, partisipasi politik, serta kesempatan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks pembangunan perdamaian, pemberdayaan menjadi penting karena kelompok yang selama ini mengalami marginalisasi sering kali memiliki keterbatasan dalam memperjuangkan hak dan kepentingannya. Oleh karena itu, pemberdayaan dipandang sebagai strategi untuk memperkuat ketahanan masyarakat sekaligus menciptakan kondisi yang lebih inklusif dalam proses perdamaian. Dalam konteks Afghanistan, pemberdayaan perempuan menjadi relevan karena perempuan merupakan kelompok yang mengalami berbagai bentuk pembatasan hak sejak Taliban kembali berkuasa pada tahun 2021.

Elemen lain yang tidak kalah penting dalam peacebuilding operations adalah pendampingan sosial (social support). Pendampingan sosial merupakan bentuk dukungan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang terdampak konflik melalui bantuan psikososial, fasilitasi akses terhadap layanan dasar, penguatan jaringan sosial, serta peningkatan kapasitas komunitas untuk menghadapi berbagai dampak konflik. Pendampingan sosial bertujuan membantu masyarakat mempertahankan keberlangsungan hidup dan meningkatkan kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan kondisi yang penuh ketidakpastian. Dalam pelaksanaannya, pendampingan sosial tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga pada pemulihan kondisi sosial dan psikologis masyarakat yang terdampak konflik. Dengan demikian, pendampingan sosial menjadi bagian integral dari

peacebuilding operations karena berkontribusi pada terciptanya stabilitas sosial serta memperkuat ketahanan kelompok rentan dalam situasi pascakonflik maupun konflik yang masih berlangsung.

Dalam konsep peacebuilding, pemberdayaan perempuan menjadi salah satu elemen penting dalam menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Pemberdayaan perempuan tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan peran perempuan dalam kehidupan sosial, tetapi juga mencakup kemampuan perempuan untuk memperoleh akses terhadap pendidikan, sumber daya, perlindungan hak, serta partisipasi dalam mengambil keputusan. Pemberdayaan perempuan merupakan bagian penting dalam pembangunan perdamaian karena perempuan termasuk kelompok yang paling rentan terdampak konflik dan diskriminasi sosial. Selain itu, empowerment juga berkaitan dengan kemampuan perempuan untuk menentukan pilihan hidupnya secara mandiri dan bebas dari berbagai bentuk pembatasan. Dalam konteks Afghanistan pasca-2021, pendekatan empowerment menjadi penting karena perempuan mengalami berbagai pembatasan hak setelah Taliban kembali berkuasa. Oleh karena itu, empowerment menjadi bagian dari operasi peacebuilding yang dilakukan UNAMA dalam upaya perlindungan hak perempuan di Afghanistan era Taliban 2021-2025 (Al-rusan 2016).

Dalam proses peacebuilding, aktor internasional berperan sebagai pendukung eksternal yang membantu negara pasca konflik menciptakan kondisi politik dan sosial yang stabil. Keterlibatan pihak internasional biasanya didorong oleh lemahnya kapasitas negara dalam menangani dampak konflik secara menyeluruh. Keterlibatan pihak internasional biasanya didorong oleh lemahnya kapasitas negara dalam menangani dampak konflik secara menyeluruh. Peran tersebut dijalankan melalui pemberian dukungan politik, teknis, dan kemanusiaan tanpa mengambil alih kewenangan negara. Selain itu, aktor internasional kerap terlibat dalam memfasilitasi dialog dan proses politik ditengah situasi yang rentan. Dengan demikian, kehadiran aktor internasional menjadi elemen pendukung penting dalam upaya membangun perdamaian yang berkelanjutan (Mahfudin 2021).

Selain berkontribusi pada proses stabilitas negara, aktor internasional juga memiliki peran signifikan dalam upaya perlindungan hak asasi manusia. Kegiatan pemantauan terhadap kondisi HAM dilakukan untuk mencegah terjadinya eskalasi kekerasan serta mengurangi risiko konflik berulang. Melalui mekanisme pelaporan dan advokasi, aktor internasional mendorong terciptanya akuntabilitas atas berbagai pelanggaran yang terjadi. Keterlibatan ini turut memperkuat kepercayaan masyarakat dan komunitas internasional terhadap proses peacebuilding yang berlangsung. Oleh karena itu, peran aktor internasional tidak hanya bersifat operasional, tetapi juga memiliki dimensi normatif dalam membentuk arah dan kualitas perdamaian pasca konflik (Mahfudin 2021).

Dalam praktik peacebuilding operations, isu hak asasi manusia ditempatkan sebagai komponen utama dalam upaya menciptakan perdamaian yang bersifat jangka panjang. Pelanggaran terhadap hak-hak dasar sering kali tidak hanya muncul sebagai konsekuensi konflik, tetapi juga berpotensi memperpanjang ketegangan apabila tidak mendapatkan penanganan yang memadai (UNU CPR 2024). Oleh sebab itu, perlindungan hak asasi manusia menjadi bagian penting dari pendekatan peacebuilding untuk mengurangi risiko terulangnya kekerasan. Pendekatan ini menegaskan bahwa stabilitas pasca konflik tidak dapat dipisahkan dari pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Dengan demikian agenda hak asasi manusia memiliki posisi strategis dalam kerangka peacebuilding.

Selain berfungsi sebagai upaya perlindungan, peacebuilding operations juga mendorong dilakukannya pemantauan dan dokumentasi terhadap pelanggaran hak asasi manusia di negara pasca konflik. Mekanisme tersebut memungkinkan aktor internasional untuk menyoroti situasi yang berpotensi mengancam keselamatan dan kebebasan masyarakat (UNU CPR 2024). Melalui laporan yang sistematis, peacebuilding operations berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas para aktor yang terlibat dalam pelanggaran (Hunt and Day 2024). Dalam kondisi dimana institusi nasional belum mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif, peran aktor internasional menjadi semakin krusial. Oleh karena itu, perlindungan hak asasi manusia

dalam peacebuilding operations tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga berorientasi pada pencegahan konflik di masa depan.

Pelaksanaan peacebuilding operations menjadi semakin kompleks ketika berlangsung di bawah pemerintahan de facto, yakni otoritas yang menjalankan fungsi negara tanpa memperoleh pengakuan internasional secara resmi. Kondisi ini menempatkan aktor internasional pada dilematis karena interaksi yang dilakukan berpotensi dipersepsikan sebagai bentuk pengakuan politik (UNU CPR 2021). Namun, penghentian keterlibatan justru dapat memperburuk krisis kemanusiaan dan memperlemah perlindungan terhadap masyarakat sipil. Dalam kondisi ini, peacebuilding operations umumnya dijalankan dengan ruang gerak yang terbatas dan pendekatan yang berhati-hati (UNU CPR 2021). Fokus utama diarahkan pada pemenuhan kebutuhan kemanusiaan serta perlindungan hak dasar masyarakat, bukan pada penguatan legitimasi pemerintahan yang berkuasa.

Dalam konteks Afghanistan pasca-2021, *United Nations Assistance Mission in Afghanistan* (UNAMA) berperan sebagai mekanisme peacebuilding operations yang dijalankan oleh PBB (Perempuan and Permatasari 2025). UNAMA termasuk dalam kategori misi politik yang mengedepankan instrument diplomasi pemantauan dibandingkan pendekatan militer. Mandat UNAMA meliputi pengamatan terhadap perkembangan politik, pendokumentasian pelanggaran hak asasi manusia, serta penyampaian advokasi bagi kelompok-kelompok rentan (UNAMA 2025). Melalui peran tersebut, UNAMA berupaya mempertahankan keterlibatan internasional tanpa memberikan legitimasi formal kepada pemerintahan de facto. Dengan demikian, UNAMA menjadi representasi peacebuilding operations yang mentitikberatkan pada stabilitas sosial dan kemanusiaan.

Meskipun memiliki peran strategis, peacebuilding operations juga menghadapi berbagai keterbatasan konseptual dan praktis. Efektivitasnya sering kali terhambat ketika aktor domestic tidak memiliki komitmen terhadap prinsip perdamaian dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, mandate yang bersifat normative kerap sulit diterjemahkan ke dalam tindakan

nyata akibat pembatasan akses dan tekanan politik. Kritik lain menyoroti resiko minimnya kepemilikan lokal karena proses perdamaian banyak digerakkan oleh aktor eksternal. Oleh sebab itu, peacebuilding operations dipandang sebagai pendekatan yang penting dalam konteks pasca konflik, namun memiliki keterbatasan dalam menghasilkan transformasi struktural secara cepat.

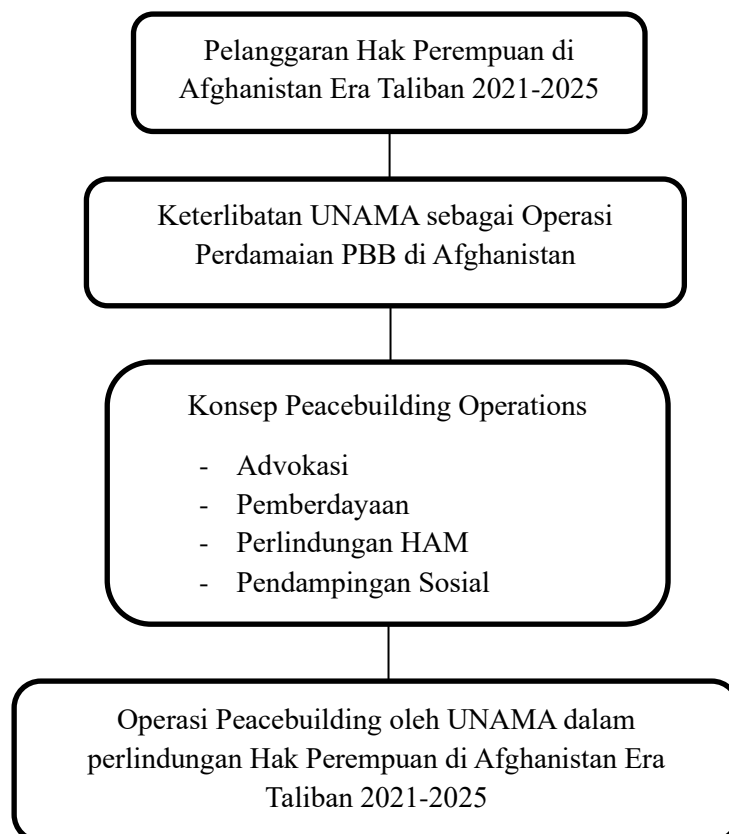
### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini menggunakan pendekatan peacebuilding operations untuk menjelaskan peran UNAMA dalam perlindungan hak perempuan di Afghanistan pasca-2021. Kembalinya Taliban ke tampuk kekuasaan pada tahun 2021 menyebabkan meningkatnya berbagai pembatasan terhadap perempuan, seperti larangan pendidikan, pembatasan pekerjaan, serta terbatasnya partisipasi perempuan di ruang publik. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pelanggaran hak perempuan yang berlangsung secara sistematis dan memerlukan perhatian dari aktor internasional.

Dalam situasi tersebut, UNAMA hadir sebagai misi politik PBB yang menjalankan operasi perdamaian di Afghanistan. Penelitian ini menggunakan konsep peacebuilding operations karena pendekatan tersebut tidak hanya berfokus pada penghentian konflik, tetapi juga mencakup perlindungan hak asasi manusia, pemberdayaan masyarakat, advokasi, serta pembangunan perdamaian berkelanjutan. Oleh karena itu, peacebuilding dipahami sebagai upaya multidimensional yang dilakukan untuk menjaga stabilitas sosial dan melindungi kelompok rentan, termasuk perempuan.

Dalam penelitian ini, peacebuilding operations dijelaskan melalui beberapa elemen utama, yaitu advokasi hak perempuan, pemberdayaan perempuan, perlindungan hak asasi manusia, serta pendampingan dan dukungan sosial terhadap kelompok rentan. Melalui elemen-elemen tersebut, penelitian ini menjelaskan bagaimana UNAMA menjalankan operasi peacebuilding dalam merespons pelanggaran hak perempuan di Afghanistan pasca-2021. Dengan demikian, kerangka pemikiran ini digunakan untuk menjelaskan keterkaitan antara pelanggaran hak perempuan di Afghanistan,

operasi peacebuilding oleh UNAMA, serta upaya perlindungan hak perempuan yang dilakukan pada era Taliban 2021-2025.



Gambar 2 Kerangka Pemikiran

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial dan politik secara mendalam terkait perlindungan hak perempuan di Afghanistan pasca-2021. Pendekatan ini mengeksplorasi dinamika yang terjadi dalam konteks yang kompleks dan tidak dapat diukur secara kuantitatif. Selain itu, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menginterpretasikan data secara fleksibel berdasarkan konteks yang ada. Dengan demikian, pendekatan ini dianggap paling relevan untuk mengkaji peran UNAMA dalam situasi yang dinamis.

Pendekatan deskriptif analisis digunakan untuk menggambarkan sekaligus menganalisis fenomena yang diteliti. Penelitian ini tidak hanya memaparkan kondisi perlindungan hak perempuan di Afghanistan, tetapi juga menganalisis peran UNAMA dalam merespons kondisi tersebut. Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka *peacebuilding operations* sebagai dasar teoritis dalam memahami data. Pendekatan ini memungkinkan peneliti dapat menghubungkan antara konsep teoritis dengan realitas empiris yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai peran UNAMA serta tantangan yang dihadapi dalam perlindungan hak perempuan di Afghanistan.

### **3.2 Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada analisis peran United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) dalam perlindungan hak perempuan di Afghanistan pasca-2021. Fokus ini dipilih karena perempuan menjadi kelompok yang paling terdampak oleh perubahan kebijakan dan kondisi sosial politik setelah kembalinya Taliban. Dalam penelitian ini, peran UNAMA menganalisis berdasarkan fungsi-fungsi utamanya, seperti pemantauan, pelaporan, dan advokasi terkait hak asasi manusia. Selain itu, penelitian ini juga melihat bagaimana pendekatan peacebuilding operations digunakan dalam memahami upaya perlindungan terhadap perempuan. Dengan demikian, fokus penelitian ini untuk menganalisis keterkaitan antara peran UNAMA, konsep peacebuilding, dan kondisi perlindungan hak perempuan di Afghanistan.

Menganalisis peran, penelitian ini juga memfokuskan pada berbagai tantangan yang dihadapi UNAMA dalam menjalankan mandatnya. Tantangan tersebut mencakup keterbatasan akses dilapangan, dinamika politik di bawah pemerintahan de facto, serta hambatan dalam implementasi nilai-nilai hak asasi manusia. Fokus ini penting untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai efektivitas peran UNAMA dalam situasi yang kompleks. Melalui analisis ini, penelitian tidak hanya menjelaskan apa yang dilakukan UNAMA, tetapi juga menilai sejauh mana peran tersebut dapat berjalan secara optimal. Oleh karena itu, fokus penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait perlindungan hak perempuan dalam konteks peacebuilding di Afghanistan.

### **3.3 Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data tersebut mencakup jurnal ilmiah, artikel, buku referensi, hasil penelitian terdahulu, serta berbagai dokumen yang diperoleh dari situs resmi UNAMA <https://unama.unmissions.org/>, UNESCO <https://www.unesco.org/en>, United Nations <https://www.un.org/en/>, UN Women <https://www.unwomen.org/en>,

United Nations Peacekeeping <https://peacekeeping.un.org/en>. dan situs resmi lainnya yang mencakup informasi mengenai dinamika situasi politik dan keamanan Afghanistan, perkembangan kebijakan Taliban terhadap pendidikan perempuan, laporan HAM, serta berbagai publikasi resmi UNAMA yang berkaitan dengan pelaksanaan mandatnya dalam melindungi hak pendidikan perempuan pada periode 2021–2025. Pemanfaatan data sekunder ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif dan berbasis sumber kredibel mengenai peran UNAMA pada periode 2021-2025.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumentasi atau studi kepustakaan. Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data sekunder yang relevan dengan topik penelitian, seperti laporan resmi, jurnal ilmiah, buku, serta dokumen dari organisasi internasional. Sumber utama dalam penelitian ini berasal dari laporan yang diterbitkan oleh UNAMA dan lembaga terkait lainnya yang membahas kondisi hak perempuan di Afghanistan. Selain itu, data juga diperoleh dari publikasi lembaga internasional seperti UN Women, Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta artikel akademik yang relevan. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti dapat memperoleh data yang komprehensif untuk mendukung analisis penelitian.

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Proses analisis diawali dengan tahap reduksi data, yaitu memilah dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian terkait peran UNAMA dalam perlindungan hak perempuan di Afghanistan. Selanjutnya, data yang telah dipilih disajikan dalam bentuk narasi yang terstruktur untuk memudahkan pemahaman terhadap hubungan antar temuan. Pada tahap berikutnya, peneliti melakukan interpretasi data dengan mengaitkannya pada konsep peacebuilding operations sebagai kerangka analisis. Melalui tahapan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan yang mampu

menjelaskan peran serta tantangan UNAMA dalam perlindungan hak perempuan secara komprehensif.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengkaji data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti laporan organisasi internasional, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi lainnya. Triangulasi ini bertujuan untuk memastikan konsistensi dan keakuratan informasi yang digunakan dalam analisis. Selain itu, peneliti juga melakukan cross-check terhadap data yang memiliki kesamaan topik untuk menghindari bias dan meningkatkan validitas temuan penelitian. Dengan demikian hasil analisis yang dihasilkan diharapkan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi dan dapat dipertanggung jawabkan secara akademik.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai operasi perdamaian UNAMA dalam perlindungan hak perempuan di Afghanistan era Taliban tahun 2021–2025, dapat disimpulkan bahwa UNAMA memiliki peran penting sebagai misi politik Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam merespons krisis kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia di Afghanistan. Setelah Taliban kembali mengambil alih kekuasaan pada tahun 2021, kondisi hak perempuan mengalami kemunduran yang sangat signifikan melalui berbagai kebijakan pembatasan terhadap pendidikan, pekerjaan, mobilitas, dan partisipasi perempuan di ruang publik. Dalam situasi tersebut, UNAMA tetap menjalankan mandatnya melalui kegiatan pemantauan, pelaporan, advokasi, dan koordinasi bantuan kemanusiaan sebagai bagian dari peacebuilding operations di Afghanistan. Keberadaan UNAMA menjadi penting karena Afghanistan mengalami keterbatasan perlindungan hak asasi manusia di tingkat domestik setelah perubahan kekuasaan politik. Dengan demikian, UNAMA berfungsi sebagai aktor internasional yang menjaga isu perlindungan perempuan Afghanistan tetap berada dalam perhatian masyarakat internasional.

Penelitian ini menunjukkan bahwa peacebuilding operations yang dilakukan UNAMA lebih berorientasi pada pendekatan politik dan kemanusiaan dibandingkan pendekatan militer. Dalam pelaksanaannya, UNAMA berupaya mendokumentasikan berbagai bentuk pelanggaran hak perempuan dan menyampaikan laporan tersebut kepada komunitas internasional secara berkala. Selain itu, UNAMA juga melakukan advokasi terhadap perlindungan perempuan melalui kerja sama dengan organisasi internasional dan lembaga kemanusiaan

lainnya. Upaya tersebut dilakukan agar kondisi perempuan Afghanistan tetap memperoleh perhatian global meskipun situasi politik Afghanistan semakin tertutup pasca-2021. Melalui fungsi tersebut, UNAMA tidak hanya menjalankan mandat politik Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi juga menjalankan peran peacebuilding dalam menjaga stabilitas sosial dan kemanusiaan di Afghanistan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas peacebuilding operations UNAMA masih menghadapi berbagai hambatan yang kompleks. Salah satu hambatan terbesar berasal dari kebijakan dan ideologi Taliban yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Taliban menerapkan berbagai pembatasan terhadap perempuan dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan aktivitas sosial sehingga mempersempit ruang partisipasi perempuan di Afghanistan. Kondisi tersebut menyebabkan perlindungan hak perempuan menjadi semakin sulit dilakukan karena pemerintah *de facto* justru menjadi pihak yang melakukan pembatasan terhadap hak-hak perempuan secara sistematis. Situasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan peacebuilding sangat dipengaruhi oleh kondisi politik domestik dan komitmen pemerintah terhadap perlindungan hak asasi manusia.

Selain hambatan ideologis, penelitian ini juga menemukan adanya keterbatasan akses operasional yang dihadapi UNAMA dalam menjalankan mandatnya di Afghanistan. Situasi keamanan yang tidak stabil serta pembatasan mobilitas menyebabkan UNAMA mengalami kesulitan dalam menjangkau berbagai wilayah di Afghanistan, terutama daerah yang berada di bawah kontrol kuat Taliban. Kondisi tersebut berdampak terhadap proses pemantauan pelanggaran hak asasi manusia dan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada masyarakat sipil. Di sisi lain, perempuan Afghanistan yang tinggal di wilayah terpencil juga semakin sulit memperoleh akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial akibat keterbatasan operasional tersebut. Dengan demikian, keterbatasan akses lapangan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas peacebuilding operations UNAMA di Afghanistan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dinamika politik internasional turut memengaruhi pelaksanaan peacebuilding di Afghanistan pasca-2021. Tidak

adanya pengakuan internasional terhadap pemerintahan Taliban menciptakan posisi yang dilematis bagi UNAMA dalam menjalankan hubungan dengan otoritas *de facto* Afghanistan. Di satu sisi, UNAMA perlu menjaga komunikasi dengan Taliban agar bantuan kemanusiaan dan perlindungan masyarakat sipil tetap dapat berjalan. Namun di sisi lain, hubungan tersebut dapat dipersepsikan sebagai bentuk legitimasi politik terhadap pemerintahan Taliban oleh masyarakat internasional. Kondisi tersebut menyebabkan ruang gerak UNAMA menjadi terbatas dalam menjalankan fungsi diplomasi dan perlindungan hak asasi manusia secara bersamaan.

Selain itu, keterbatasan mandat dan kapasitas institusional UNAMA juga menjadi hambatan penting dalam pelaksanaan *peacebuilding* di Afghanistan. Sebagai misi politik Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNAMA tidak memiliki kewenangan koersif maupun kekuatan militer untuk memaksa Taliban mematuhi standar hak asasi manusia internasional. Peran UNAMA lebih banyak terbatas pada pemantauan, pelaporan, dan advokasi normatif terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi di Afghanistan. Akibatnya, berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan tetap berlangsung meskipun telah mendapatkan perhatian internasional melalui laporan dan publikasi UNAMA. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa *peacebuilding operations* yang bersifat normatif memiliki keterbatasan ketika dihadapkan pada pemerintahan yang tidak memiliki komitmen terhadap prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa UNAMA memiliki peran penting dalam menjaga perhatian internasional terhadap perlindungan hak perempuan di Afghanistan era Taliban 2021–2025. Namun, efektivitas *peacebuilding operations* yang dilakukan UNAMA masih menghadapi berbagai tantangan politik, keamanan, sosial, dan institusional yang sangat kompleks. Taliban, keterbatasan akses operasional, dinamika politik internasional, dan keterbatasan mandat menjadi faktor utama yang menghambat perlindungan hak perempuan di Afghanistan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa *peacebuilding* tidak dapat berjalan secara optimal apabila tidak didukung oleh stabilitas politik dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di tingkat domestik. Oleh karena itu, perlindungan hak perempuan di Afghanistan masih

menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan peacebuilding pasca kembalinya Taliban tahun 2021.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan terkait pelaksanaan peacebuilding operations UNAMA dalam perlindungan hak perempuan di Afghanistan. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan komunitas internasional perlu memperkuat dukungan politik dan kemanusiaan terhadap masyarakat Afghanistan, khususnya perempuan dan anak perempuan yang menjadi kelompok paling terdampak pasca kembalinya Taliban. Dukungan tersebut tidak hanya berupa bantuan kemanusiaan, tetapi juga melalui peningkatan tekanan diplomatik internasional agar Taliban memberikan ruang yang lebih besar terhadap pemenuhan hak perempuan dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi sosial. Selain itu, komunitas internasional perlu menjaga konsistensi perhatian terhadap kondisi perempuan Afghanistan agar isu tersebut tidak mengalami penurunan perhatian di tingkat global. Dengan demikian, dukungan internasional diharapkan dapat membantu memperkuat perlindungan hak perempuan di Afghanistan secara lebih berkelanjutan.

UNAMA juga perlu memperkuat mekanisme pemantauan dan dokumentasi pelanggaran hak asasi manusia di Afghanistan agar berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan dapat terdokumentasi secara lebih sistematis dan menyeluruh. Dokumentasi yang kuat sangat penting untuk menjaga akuntabilitas internasional serta menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan respons kemanusiaan internasional terhadap situasi Afghanistan. Selain itu, kerja sama antara UNAMA, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat sipil lokal perlu ditingkatkan agar proses perlindungan masyarakat dapat menjangkau wilayah-wilayah yang sulit diakses. Penguatan koordinasi tersebut juga penting untuk meningkatkan efektivitas bantuan kemanusiaan dan perlindungan kelompok rentan di Afghanistan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas operasional dan jaringan kerja sama menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas peacebuilding operations UNAMA.

Dalam konteks peacebuilding, pendekatan perlindungan hak perempuan juga perlu dilakukan secara lebih inklusif dengan melibatkan perempuan Afghanistan dalam proses sosial dan kemanusiaan. Keterlibatan perempuan penting karena peacebuilding yang berkelanjutan tidak dapat tercapai apabila perempuan tetap berada dalam posisi yang terpinggirkan secara sosial maupun politik. Selain itu, perempuan Afghanistan perlu diberikan ruang yang lebih besar untuk terlibat dalam pendidikan, pemberdayaan sosial, serta proses advokasi terkait perlindungan hak asasi manusia. Partisipasi perempuan dalam proses perdamaian juga dapat membantu menciptakan pembangunan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Afghanistan. Dengan demikian, pemberdayaan perempuan harus menjadi bagian penting dalam pelaksanaan peacebuilding operations di Afghanistan.

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian yang lebih mendalam mengenai efektivitas operasi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam konteks pemerintahan *de facto* dan konflik multidimensional. Penelitian selanjutnya juga dapat membandingkan peran UNAMA dengan misi politik Perserikatan Bangsa-Bangsa di negara konflik lainnya agar diperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai efektivitas peacebuilding operations. Selain itu, penelitian mendatang dapat menggunakan pendekatan yang lebih spesifik dalam melihat dampak kebijakan Taliban terhadap kelompok perempuan, anak-anak, maupun kelompok minoritas lainnya di Afghanistan. Kajian yang lebih mendalam diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik yang lebih luas terhadap studi hubungan internasional, hak asasi manusia, dan peacebuilding pascakonflik. Oleh karena itu, penelitian mengenai Afghanistan masih memiliki relevansi yang tinggi untuk terus dikembangkan di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdenur, Adriana E. 2022. "Local Approaches to Climate-Sensitive Peacebuilding: Lessons from Afghanistan." 1(June):40–58. doi:10.1332/UOQE8930.
- Afzal, Rabia. 2024. "Postcolonial Critique of Political Instability and Human Rights in Afghanistan." 3(4):305–25.
- Ahmadzai, Ibrahim. 2024. "Peacebuilding Efforts in Civil War-Affected Countries in Afghanistan." 4(2):11–22.
- Akhmady, Fajarningrum et al. 2021. "Perempuan Dalam Proses Perdamaian : Perjuangan Perempuan Afghanistan Melawan Penindasan Berlapis Selama Perundingan Damai." (6):57–71.
- Al-rusan, Mariko Gakiya; Aime Tu Wu; Tala. 2016. "Women's Leadership and Empowerment for Peacebuilding." *Sasakawa Peace Foundation*.
- Alert, Gender. 2021. "WOMEN ' S RIGHTS IN AFGHANISTAN : WHERE ARE WE NOW ?" (1):1–8.
- Asdiarti, Riwana, and Agussalim Burhanuddin. 2024. "The Impact of the Taliban's Return to Power on the Stability of Public Security in Afghanistan." *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)* 5(1):45–61. doi:10.15408/jisi.v5i1.39525.
- Azam, Muhammad. 2024. "AFGHAN PEACE BUILDING PROCESS : PROBLEMS AND PROSPECTS." (94).
- Campbell, Susanna P., and Aila M. Matanock. 2024. *Weapons of the Weak State : How Post - Conflict States Shape International Statebuilding*. Springer US.

- Country, United Nations. 2022. "UNITED NATIONS COUNTRY."
- Damayanti, Chyntya et al. 2026. "Upaya Peacemaking United Nations Assistance Mission In Afghanistan ( UNAMA ) Dalam Manajemen Konflik Antara Taliban Dan Aktor Domestik Afghanistan Pada Tahun 2021-2023." 289–98.
- Hansen, Annika S. 2025. "The Future of United Nations Peace Operations Compendium of Policy Papers and Policy Recommendations for for the UN Peacekeeping Ministerial 2025 in Berlin Introduction : In Times of Trouble." (May).
- Helder Nhamaze, Jacinta Jorge, Nqobile Moyo, Cyhntia Brain. 2022. "Operationalising the Peacebuilding and Sustaining Peace Agenda in Mozambique."
- Human Rights Watch. 2025. "Afghanistan Events of 2024." <https://www.hrw.org/world-report/2025/country-chapters/afghanistan>.
- Hunt, Charles T., and Adam Day. 2024. "Strengthening a Rights-Based Approach to United Nations Peace Operations Geneva Centre for Security Policy." (14).
- Idagu, Edward. 2025. "CONFLICT , CONFLICT RESOLUTION AND CONFLICT MANAGEMENT : A LITERATURE REVIEW." 114–31.
- Koops, Joachim A., and Martina Dal. 2025. "The Future of United Nations Peace Operations Compendium of Short Issue Papers and Policy Recommendations for the UN Peacekeeping Ministerial 2025 in Berlin." (May).
- Liputan6.com. 2022. "Potret Perempuan Afghanistan Di Tengah Aturan Wajib Burqa." <https://www.liputan6.com/photo/read/4959539/foto-potret-perempuan-afghanistan-di-tengah-aturan-wajib-burqa?page=3>.
- Mahfudin, Irvan Aladip. 2021. "Global : Jurnal Politik Internasional Faith-Based Transnational Actors and Peacebuilding : An Analysis of the Role Of Nahdlatul Ulama in Afghanistan ' s Peace Process." 23(1).

doi:10.7454/global.v23i1.582.

- Murphy, Sean D. et al. 2021. "U.S. Withdraws from Afghanistan as the Taliban Take Control." *American Journal of International Law* 115(4):745–53. doi:10.1017/ajil.2021.50.
- Nations, United, and General Assembly. 2022. "Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights General Assembly." (36).
- Perempuan, Perlindungan, and Endah Permatasari. 2025. "PERAN UNITED NATIONS ASSISTANCE MISSION IN AFGHANISTAN ( UNAMA ) DALAM MEMBERIKAN." 02(01).
- Pote, Eunike Irene, and Yeyen Subandi. 2025. "Upaya United Nations Assistance Mission In Afghanistan (UNAMA) Dalam Mengatasi Ketimpangan Gender Di Bawah Pemerintahan Taliban Pada Periode 2023-2024." *Jurnal Ilmiah Multidisipin* 3(7):438–47. doi:10.60126/jim.v3i7.1090.
- Report, Security Council. 2025. "Update on the Human Rights Situation in Afghanistan :” (June).
- Report, Situation. 2025. "Afghanistan Education Situation Report 2025 1."
- Salindri, Dewi et al. 2024. "Dinamika Politik Afghanistan Pasca Mundurnya Uni Soviet Hingga Masa Enduring Freedom, 1989-2001." *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah Dan Pendidikan* 8(2):331–41. doi:10.29408/fhs.v8i2.24068.
- Sasakawa Peace foundation. 2023. "Afghanistan – People and Society." <https://www.cia.gov/the-world-factbook/about/archives/2023/countries/afghanistan/>.
- Setiawati, Siti Mutiah. 2025. "Challenges and Opportunities of the Taliban in the Process of State Building in Afghanistan : Post-American Departures." 2(1):1–10.

- Shafiei, Mahtab, and Kathryn Overton. 2023. "Mirage or Oasis ? Assessing the Role of the United Nations Assistance Mission in Afghanistan." 11(2):357–76. doi:10.18588/202311.00a398.
- Suharto, Miko Aditiya, and Maria Novita Apriyani. 2022. "Kapasitas Pemerintahan Afghanistan Rezim Taliban Baru Sebagai Peserta Dalam Perjanjian Internasional." 18:34–43.
- Sulaiman, Shihab et al. 2024. "Evaluating the Effectiveness of United Nations Peacebuilding Operations." 6798:3319–35.
- UN WOMEN. 2024. "Afghanistan Gender Country Profile 2024." *Afghanistan Gender Country Profile 2024*. doi:10.18356/9789211065329.
- UNAMA. 2022. "Human Rights in Afghanistan 15." (June).
- UNAMA. 2025. "UNAMA Human Rights." <https://unama.unmissions.org/en/unama-human-rights>.
- United Nations. 2024. "HIGHLIGHTS OF SECURITY COUNCIL PRACTICE 2023." (January).
- United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA). 2025. "UNAMA Mandate." <https://unama.unmissions.org/en/unama-mandate>.
- UNU CPR. 2021. "Peacebuilding and Authoritarianism: The Unintended Consequences of UN Engagement in Post-Conflict Settings." <https://unu.edu/cpr/project/peacebuilding-and-authoritarianism-unintended-consequences-un-engagement-post-conflict>.
- UNU CPR. 2024. "UN Peace Operations and Human Rights: A Thematic Study." <https://unu.edu/publication/un-peace-operations-and-human-rights-thematic-study>.
- Zulkarnain, Fisher et al. 2023. "Taliban and Afghanistan; a Systematic Literature Review Taliban Dan Afghanistan; Sebuah Kajian Pustaka Sistematis." 5(1):1–28.